

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM SEBAGAI PERAN PENTING DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ananda Mutiara¹ Eva Lstari² Visi Al Pisma³

Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa

*Corresponding author: 2288220002@untirta.ac.id

Abstrak

Kurikulum menjadi bagian terpenting dalam kerberlangsungan system pendidikan di suatu negara terkhusus negara Indonesia. Dengan mengetahui Sejarah perkembangan kurikulum dari masa ke masa, maka akan mendapatkan informasi berharga mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam kurikulum, juga dengan cara mengamati perubahan system pendidikan. Kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan mulai dari masa kemerdekaan yang masih dibawah kendali pemerintah kolonial Belanda yang memiliki nama Rencana Pelajaran 1947 hingga masa sekarang dengan system kurikulum Merdeka. Dengan mengetahui sejarah perkembangan kurikulum pendidik dapat membedakan berbagai perubahan yang terjadi sehingga dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan cara belajar terhadap peserta didik dengan arah yang sesuai perkembangan kurikulum dan juga zaman. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Sejarah Perkembangan Kurikulum sebagai peran penting dalam Pendidikan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode Sejarah dan Historiografi dengan mengumpulkan beberapa sumber mulai dari buku, artikel, dan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian.

Kata Kunci : Pendidikan, Kurikulum, Sejarah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, hal ini karena besarnya peran dan dampak positif yang ditimbulkan dari majunya suatu system pendidikan. Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan yaitu keberadaan system kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga cara mengaplikasikannya di lapangan. Kurikulum memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta pedoman cara penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Kurikulum dalam pendidikan memiliki kedudukan sebagai acuan utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Seperti pada Undang-undang seperangkat rencana dan pengertian mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9).

Dengan adanya kurikulum, mampu mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Seperti pada lingkup sekolah, akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Karena itulah, kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan. Di Indonesia, telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Tentunya dari berbagai pergantian tersebut ada sisi positif maupun negatif. Kurikulum di Indonesia dikembangkan dan disepakati oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan guru-guru atau tenaga pengajar.

Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pendidikan harusnya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga dapat memberikan perubahan baru yang bertujuan untuk memenuhi ketercapaian tujuan pendidikan dan hasil yang diharapkan dengan arah yang sesuai dan jelas. Pembaharuan dalam

kurikulum pendidikan menjadi sebuah konsekuensi dan implikasi dari sebuah perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan keadaan lingkungan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam proses perkembangannya dengan berbagai macam permasalahan dan tantangan. Berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis menganggap penting untuk menguraikan lebih mendalam dan teliti akan Sejarah Perkembangan kurikulum sebagai peran penting dalam pendidikan Indonesia mulai dari perkembangan kurikulum tahun 1947 hingga sekarang Kurikulum Merdeka.

METODE

Dalam penulisan makalah ini menggunakan beberapa metode penelitian sejarah. Dimana penulis mencari beberapa sumber melalui buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik, fokus penulisan ditujukan untuk mengetahui Sejarah perkembangan kurikulum sebagai peran penting dalam Pendidikan di Indonesia. Adapun metode yang dilakukan antara lain :

1. Heuristik

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber-sumber melalui berbagai referensi terkait penelitian yang dikaji seperti buku dan jurnal-jurnal.

2. Kritik Sumber

Setelah mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dan relevan dilakukan kritik sumber agar data yang didapatkan lebih konkrit dan dapat dipercaya kebenarannya.

3. Interpretasi

Dalam tahapan ini penulis menafsirkan dan menyimpulkan data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber referensi. Data yang digunakan dalam penelitian akan dijadikan satu, dan kemudian akan dibandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya. Sehingga hasil analisis itu didapat inti dari sumber-sumber yang telah didapat.

4. Historografi

Historografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan data yang berupa bukti sejarah yang terkait dengan topik penulis dengan tujuan rangkaian tulisan yang sesuai.

PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Kurikulum dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1947 dengan memiliki nama Rencana Pelajaran 1947, kemudian seiring berjalannya perkembangan dan perubahan secara beruntun mengalami perubahan atau penyempurnaan pada tahun 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan revisi kurikulum 2013 serta yang sekarang sedang dijalankan kurikulum merdeka. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan masa pemberlakuannya kurikulum tersebut seperti : Kurikulum sederhana yaitu kurikulum yang berlaku tahun 1947 sampai tahun 1964, pembaharuan kurikulum yaitu yang berlaku pada kurikulum 1968 sampai tahun 1975, kurikulum berbasis keterampilan proses yaitu kurikulum yang berlaku pada tahun 1984 sampai dengan 1999, kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum

pada tahun 2004 sampai dengan kurikulum 2006, kemudian kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yaitu kurikulum yang berlaku pada tahun 2006, dan pendekatan Saintifik kurikulum pada tahun 2013, yang terakhir kurikulum prototipe yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.

Penyusunan kurikulum di Indonesia sering kali tidak pernah melibatkan pelaku di lapangan melainkan secara terpusat, tidak menyesuaikan ciri khas atau karakter pada masyarakat pada suatu daerah, mengabaikan potensi dan kemampuan yang berbeda pada setiap individu peserta didik dan mengabaikan fasilitas atau sarana pendidikan yang tidak merata.

Akan tetapi dalam perkembangannya, proses penyusunan kurikulum di Indonesia tidak mutlak bersifat sentralistik. Meskipun dalam penyusunannya terpusat pemerintah secara bertahap melakukan segala upaya dalam perubahan dan pembaharuan kurikulum ke dalam kurikulum yang mencapai keberhasilan pada suatu peserta didik dan mengetahui berbagai kendala dan permasalahan, serta kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian sedikit permasalahan dalam pendidikan mulai di tangani dengan menerapkan kurikulum baru yang belum lama lahir sekitar tahun 2022, kurikulum mereka merupakan kurikulum yang lebih fleksibel dalam proses pembelajarannya dengan cara mandiri dan yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.

Kemudian untuk memahami lebih mendalam terkait sejarah perkembangan kurikulum sebagai peran penting dalam pendidikan di Indonesia, maka berikut ini akan dibahas terkait perkembangan kurikulum sebagai peran penting dalam pendidikan di Indonesia.

1. Rencana Pelajaran 1947

Istilah kurikulum pada saat itu belum populer di Indonesia tahun 1947, sehingga kurikulum yang pertama ditetapkan pemerintah dalam bahasa Belanda disebut *leer plan* atau dalam bahasa Indonesia disebut Rencana Pelajaran dan kemudian dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini merupakan kurikulum yang menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan berorientasi kepada kepentingan nasional untuk membentuk generasi awal bangsa Indonesia yang memiliki nilai – nilai nasionalisme, patriotisme, kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Rencana Pelajaran 1947 pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga pada hakikatnya hanya meneruskan kurikulum yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual yang digunakan yang digunakan pada sistem pendidikan kolonial Belanda, kemudian menetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan, yang mengutamakan pendidikan watak dan mengubah nilai-nilai yang terkandung didalamnya ke arah nilai nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Kurikulum ini memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran yang disertai jam pengajarannya dan garis besar pengajarannya. Pada kurikulum ini materi pelajaran dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan perhatian terhadap pendidikan jasmani dan kesenian.

Adapun sistem penilaian yang dilakukan dalam kurikulum 1947 ini melalui ulangan harian dan ulangan umum catur wulan guna untuk menentukan kenaikan tingkat atau kenaikan kelas para peserta didik. Sedangkan penilaian untuk menentukan kelulusan dengan cara mencapai tujuan yang disebut ujian

penghabisan. Dengan berbagai penyebab oleh beberapa hal, termasuk agresi Belanda. Sehingga praktek dalam pembelajaran kurikulum 1947 dilaksanakannya secara resminya pada tahun 1950, kemudian banyak kalangan yang menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1950.

2. Perkembangan Kurikulum 1952

Kurikulum 1952 merupakan kurikulum peyemurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang dilakukan untuk memenuhi kelengkapan dari undang-undang No. 4 Tahun 1950 yang didalamnya tentang tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan dan untuk menyesuaikan dengan SKB dan menteri tahun 1951 yang menyatakan bahwa pendidikan agama juga diselenggarakan di sekolah-sekolah.

Kurikulum 1952 dikenal juga dengan sebutan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nama tersebut diambil berdasarkan nama buku pedoman kurikulum SR yang diterbitkan oleh pemerintah melalui departemen pengajaran pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1952. Dalam pedoman SR ini berisi tentang bimbingan untuk para guru dalam mengajar di sekolah rakyat dan juga memberikan beberapa rician mata pelajaran yang dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah.

Pelajaran Bahasa Daerah diberikan sejak kelas dua sesuai dengan daerah masing-masing dan pelajaran Bahasa Indonesia diajarkan sejak kelas tiga yang terdiri dalam beberapa kegiatan yaitu membaca, menuliskan, percakapan, ilmu bahasa dan menulis karangan. Kemudian untuk kegiatan yang mempelajari ilmu bangun dan menghitung angka dengan metode mencongak dilakukan pada pelajaran Berhitung. Dan kegiatan yang mempelajari tentang tubuh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan terdapat dalam pelajaran Ilmu Hayat. Adapun mata pelajaran lainnya adalah Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Pendidikan Budi Pekerti, dan ditambah dengan Pendidikan Agama. Pendidikan Agama diberikan sesuai dengan agama masing-masing yang dianut oleh peserta didik namun bersifat tidak wajib.

Selain satuan mata pelajaran yang lebih diperinci dalam Rencana Pelajaran Terurai 1952, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan juga lebih diperhatikan, namun peserta didik masih diposisikan sebagai objek, karena guru menjadi subjek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Sistem penilaian pada Rencana Pelajaran Terurai 1952 hampir sama dengan Rencana Pelajaran 1947. Sekitar tahun 1958, Ujian Penghabisan yang digunakan untuk menentukan kelulusan di tingkat akhir sejak masa Rencana Pelajaran 1947 berubah menjadi Ujian Negara.

Pada masa ini juga diselenggarakan Kelas Masyarakat yang diperuntukkan bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dan mengajarkan keterampilan siap kerja seperti pertukangan, pertanian, perikanan.

Berdasarkan beberapa perkembangan yang ada dalam kurikulum yang ditetapkan tahun 1952 ini, bahwa kurikulum ini sudah mengarah pada suatu pendidikan nasional dan memiliki ciri yang menonjol pada waktu itu, yaitu: (a)

Setiap rencana pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, (b) Memiliki silabus mata pelajaran yang jelas, dan (c) Setiap guru mengajar satu mata pelajaran.

3. Perkembangan Kurikulum 1964

Menjelang berakhirnya era orde lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah menetapkan kurikulum baru yang kurikulum sebelumnya pada tahun 1964 yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita pada ketetapan MPRS No II tahun 1960 yaitu membentuk manusia Indonesia Pancasila yang sosialis.

Konsep pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 1964 adalah penekanan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang bersifat aktif, kreatif dan produktif dengan menggunakan metode yang disebut metode gotong royong terpimpin. Dengan demikian, para guru dituntut untuk mampu membimbing peserta didiknya agar memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan dengan baik.

Sedangkan Pendidikan Agama bersifat tidak wajib. Kelompok mata pelajaran pengembangan moral terdiri dari Pendidikan Kemasyarakatan dan Pendidikan Agama atau Budi Pekerti. Kemudian kelompok mata pelajaran perkembangan kecerdasan adalah Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, Berhitung, Pengetahuan Alamiah. Sedangkan mata pelajaran pengembangan emosional atau artistik diwujudkan dalam Pendidikan Kesenian.

Selain itu, pemerintah juga mendukung para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan di bidang kebudayaan, kesenian, dan olah raga sesuai dengan minat, yaitu dengan menetapkan hari sabtu sebagai hari krida yang dimanfaatkan untuk pengembangan kemampuan dan minatnya.

Sistem penilaian pada Rencana Pendidikan 1964 mengalami sedikit, yaitu perubahan pada penilaian di rapor khusus bagi siswa kelas I dan II setingkat Sekolah Dasar yang semula berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D.

4. Perkembangan Kurikulum 1968

Pasca keberhasilan bangsa Indonesia menggagalkan pengkhianatan PKI yang puncaknya pada G-30S/PKI tanggal 30 September 1965, situasi politik mengalami gejolak dan perubahan yang sangat besar. Perubahan tersebut juga mempengaruhi dunia pendidikan yang berhulu dari komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Komitmen itu dituangkan dalam beberapa ketetapan, yang salah satunya adalah ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan. Inti dari ketetapan tersebut adalah bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar dalam mendidik budi pekerti dan keyakinan atau agama sesuai agama masing-masing. Pendidikan agama yang sebelumnya bersifat tidak wajib berubah menjadi wajib. Perubahan ini sebagai implikasi dalam usaha menghindari masyarakat Indonesia dari paham komunisme dan memperbaiki kehidupan beragama dan akhlak yang selama ini telah mengalami kerusakan akibat pengaruh paham komunisme.

Sebagai usaha untuk memperbaiki mutu pendidikan dan mewujudkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pemerintah menetapkan Kurikulum 1968 untuk menyempurnakan Kurikulum

1964. Kurikulum 1968 ditandai dengan pendekatan materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda secara korelasional disebut atau *correlated subject curriculum*, yang kemudian berkembang secara bertahap ke arah pendekatan pelajaran yang terpisah-pisah berdasarkan disiplin ilmu pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi.

Dengan demikian, struktur pada Kurikulum 1968 mengalami perubahan dari Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Pendidikan olahraga adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membina jiwa Pancasila, Sedangkan untuk Pengembangan Pengetahuan Dasar melalui mata pelajaran Berhitung, IPA, Pendidikan kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian untuk Pengembangan Kecakapan Khusus diberikan materi yang sesuai jenjang masing-masing seperti Pendidikan Kejuruan.

Metode yang digunakan tidak lagi mengkaitkan dengan permasalahan sehari-hari tetapi dilakukan secara teoritis, yang penekanannya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Metode pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an, diantaranya adalah Teori Psikologi Unsur. Sedangkan untuk implementasinya diserahkan pada masing-masing sekolah atau guru.

5. Perkembangan Kurikulum 1975

Seiring berjalannya waktu negara Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1969 yang merupakan hasil dari pembangunan nasional di Indonesia yang pada saat itu dipengaruhi oleh pelita 1, dalam hal daya dan waktu, yang di realisasikan dengan sistem instruksional yang dikenal dengan sebutan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (*management by objective*) yang terkenal saat itu, "Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

6. Perkembangan Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning (SAL)*. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran

siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan.

7. Perkembangan Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Penyempurnaan kurikulum selanjutnya dilakukan dengan menetapkan kurikulum 1994 yang merupakan usaha untuk menyesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaan tutorannya serta untuk memenuhi rekomendasi dari beberapa Rakernas.

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja.

Kurikulum 1994 diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi seala permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, akan tetapi cita-cita tersebut sulit untuk diwujudkan karena terdapat berbagai permasalahan yang dikeluhkan para pelaksana pendidikan di lapangan.

Adapun yang menjadi sebuah permasalahan adalah beban belajar yang terlalu padat sehingga menjadi beban bagi peserta didik dan tidak sesuai dengan onsep pembelajaran yang diterapkan untuk menarah peserta didik menjadi lebih aktif, karena jika ingin melibatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran maka dibutuhkan waktu yang sangat banyak dan sulit untuk mencapai target kurikulum.

Permasalahan kedua yaitu konteks bahasan dalam pelajaran adanya tumpang tindih terhadap pokok bahasan seperti ada pada 2 mata pelajaran sekaligus contohnya pada pelajaran PPKn dan Sejarah yang sama-sama membahas mengenai Proklamasi, BPUPKI, dan PPKI.

Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu adanya penekanan terhadap peserta didik yang menduduki bangku SMA penekanan tersebut lebih menekankan agar fokus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mempersempit ruang peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memasuki dunia kerja bagi yang tidak diterima di perguruan tinggi atau yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Kemudian pada tahun 1999, seiring dengan jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, pemerintah melakukan usaha dalam mengatasi segala permasalahan pada kurikulum ini dengan menggunakan suplemen kurikulum 1999. Akan tetapi usaha ini belum maksimal dalam memberikan perubahan dan solusi yang menjadi beberapa kelemahan dalam kurikulum 1994.

8. Perkembangan Kurikulum KBK 2002 dan 2004

Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan

pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester.

Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, "Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?". Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, "Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?"

Pencapaian target

9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP)

Pada tahun 2006, penerapan kurikulum KBK dihentikan dan digantikan dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang disebut KTSP. Penerapan kurikulum ini merupakan implikasi dari dari PP. No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga pada saat itu pedoman KTSP berpedoman pada delapan standar nasional yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disebut BSNP. Adapun standar nasional yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan.

Penerapan KTSP dan KBK tidak memiliki banyak perbedaan dari sisi esensi isi, arah pengembangan pembelajaran, proses dan teknik evaluasi. Adapun yang menjadi perbedaan hanya pada kebijakan setiap masing masing sekolah sebagai satuan pendidikan untuk menyusun suatu rencana pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga lingkungan yang berpacu terhadap standar nasional sehingga lebih mendorong pada lokalitas pendidikan.

Pengembangan kurikulum KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan yang meliputi beberapa komponen wajib yang terdiri dari muatan lokal dan pengembangan diri secara terpadu, serta beragam yang memperhatikan keberagaman peserta didik mulai dari agama, ras, budaya, suku, dan adat tanpa membedakan bedakan satu sama lain sebagai bentuk saling mengargai dan toleransi.

10. Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 Revisi

Dengan sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kurikulum yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, sejak tahun 2012 pemerintah melakukan pengembangan yang menghasilkan Kurikulum 2013. Inti dari Kurikulum 2013 adalah penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya, dengan basis kompetensi dan penguatan karakter yang bersifat tematik- integratif, sedangkan obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan

penyempurnaan Kurikulum 2013 yaitu penekanan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Harapan utama dari Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sehingga untuk mencapainya, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang mendorong peserta didik agar memiliki kemampuan dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan serta mempresentasikan dari materi yang telah dipelajari.

Pendidikan karakter merupakan salah satu ciri khusus pada kurikulum bahwa ciri lainnya adalah pendidikan yang berwawasan lokal dan mengembangkan suasana yang bersahabat dengan menggali potensi budaya lokal, nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya dan potensi peserta didik baik potensi akademik maupun non akademik, serta menyelenggarakannya dengan suasana yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik dan berkompeten.

Ada empat hal penting yang mengalami pergeseran ataupun penyempurnaan pada Kurikulum 2013, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Pada Standar Kompetensi Lulusan atau SKL pada Kurikulum 2013 terdapat Kompetensi Inti yang merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi Kompetensi lulusan yang ditargetkan adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skills dan hard skills secara efektif yang meliputi aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, percaya diri, sikap dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

Pergeseran dalam Standar Isi adalah pembelajaran yang menjadi tematik dan terpadu. Sedangkan pergeseran dalam Standar Proses adalah selain eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, juga dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Selain itu pembelajaran sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Pergeseran dalam Standar Penilaian yaitu pada Kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik atau Penilaian Acuan Patokan yang disebut PAP, yaitu penilaian pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh siswa terhadap skor ideal berbasis kompetensi dengan memanfaatkan portofolio yang merefleksikan hasil belajar. Cakupan dalam penilaian adalah SKL, KI, dan KD yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu: Sangat Baik atau SB, Baik atau B, Cukup atau C, Kurang atau K. Laporan penilaian sikap dilakukan dalam bentuk nilai kualitatif dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antarmata pelajaran serta menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan berusaha untuk memperbaiki kurikulum 2013. Kemudian menjelang tahun 2016-2017, pemerintah berhasil menyelesaikan kurikulum yang pada saat itu disebut kurikulum nasional dan kemudian menggunakan nama Kurikulum 2013 Revisi.

Beberapa perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 Revisi merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kembali dalam penilaian sikap dengan bentuk predikat dan deskripsi, maupun penilaian-penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.

11. Kurikulum Merdeka

Pada Tahun Ajaran 2022/2023 dan 2023/2024, Kurikulum Merdeka menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan dan memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan fokus pada penguatan karakter.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Karakteristik Kurikulum Merdeka yaitu dengan pengembangan Soft Skills dan Karakter yang berfokus pada Materi Esensial dan Pembelajaran yang fleksibel.

Kemudian Proyek menjadi pencapaian penguatan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Pembelajaran berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid agar pendidik memiliki waktu memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Hal ini sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan dan isu terkini, seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, literasi kesehatan, dan pentingnya sastra dalam memperdalam kemampuan literasi peserta didik.

Pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran, seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kemudian dalam proses Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kurikulum dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga cara mengaplikasikannya di lapangan. Kurikulum memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta pedoman cara penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Kurikulum pertama pada tahun 1947 ini merupakan kurikulum yang menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan berorientasi kepada kepentingan nasional untuk membentuk generasi awal bangsa Indonesia yang memiliki nilai – nilai nasionalisme, patriotisme, kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Kurikulum 1952 dikenal juga dengan sebutan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Konsep pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 1964 adalah penekanan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang bersifat aktif, kreatif dan produktif dengan menggunakan metode yang disebut metode gotong royong terpimpin. Dengan demikian, struktur pada Kurikulum 1968 mengalami perubahan dari Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Pembinaan Kecakapan Khusus. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1984 mengusung process skill

approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. penerapan kurikulum KBK dihentikan dan digantikan dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang disebut KTSP. Penerapan kurikulum ini merupakan implikasi dari dari PP. No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga pada saat itu pedoman KTSP berpedoman pada delapan standar nasional yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disebut BSNP. Pendidikan karakter merupakan salah satu ciri khusus pada kurikulum bahwa ciri lainnya adalah pendidikan yang berwawasan lokal dan mengembangkan suasana yang bersahabat dengan menggali potensi budaya lokal, nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya dan potensi peserta didik baik potensi akademik maupun non akademik, serta menyelenggarakannya dengan suasana yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik dan berkompeten. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

References

- Ananda, A. P., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102-108.
- Astri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192-202.
- Marzuqi, B. M., & Ahid, N. (2023). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi. *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(2), 99-116.
- Nasional, D. P. (2003). Kurikulum berbasis kompetensi. Depdiknas, Jakarta.
- Roni. S. Y. Potret Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Mas ke Masa. 2020.
- Setiawan, A., Ahla, S. S. U. F., & Husna, H. (2022). Konsep Model Inovasi Kurikulum KBK, KBM, KTSP, K13, Dan Kurikulum Merdeka (Literature Review). *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 54-77.
- Sri RS & Deni S. 2023. Perkembangan kurikulum terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 1 (1). 1-2

Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari masa ke masa (telaah atas pentahapan kurikulum pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 10(2), 231-242.

Wahid, L. A., & Hamami, T. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam dan Strategi Pengembangannya dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1).

Direktorat Jenderal Pendidikan <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>